ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : M Benny Satria
NIM : 222013134

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unifersitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama	: M. Benny Satria
Nim	: 222013134
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 2019

Pembimbing I

(Drs.Sunardi, S.E.,M.Si)
NIDN/NBM : 0206046378/859196

Pembimbing II

(Darma Yanti,S.E.,A.K.,M.M.,CA)
NIDN/NBM : 0219057901/1187172

Mengetahui
Dekan
u. b Ketua Program StudiAkuntansi

(Betri Sirajuddin, S.E. M.si., AK.,CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Benny Satria

NIM : 22 2013 134

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 2019

Penulis

M. Benny Satria

ABSTRAK

M Benny Satria/222013134/2019/Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel pada pemerintah provinsi sumatera selatan. Data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memang telah memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan sehingga kualitas keuangan bisa lebih dipertanggungjawabkan akan tetapi seiring keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang mesti diperhatikan lagi yakni dari beberapa penemuan oleh BPK mengenai pengelolaan aset yang belum memadai, kekurangan volume belanja modal, peraturan perundang-undangan dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga diharapkan dengan pencapaian prestasi (WTP) tidak ada temuan lagi dari BPK.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual.

ABSTRACT

M Benny Satria / 222013134/2019 / Analysis of the Application of Accrual-Based Accounting Standards to the Government of South Sumatra / Public Sector Accounting.

The purpose of this study is to find out the application of accrual-based government accounting standards in realizing accountable governance in the government of the province of South Sumatra. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. The data analysis method that will be used in this study is qualitative and quantitative analysis. The results of the research on the application of accrual-based government accounting standards in realizing accountable governance shows that accrual-based government accounting standards have indeed had a positive impact on financial management so that financial quality can be more accountable but along with these successes there are still several obstacles that must be considered, namely from some findings by the BPK regarding inadequate asset management, lack of capital expenditure volumes, legislation and the quality of human resources. So that it is expected that with achievement (WTP) there will be no more findings from the BPK

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Basis

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Standar akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Provinsi Sumatra Selatan

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku syariffudin dan Ibuku hermawati, adiku ilham dan adiku yudi serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Bapak Drs.sunardi,S.E.,M.Si dan Ibu Darmayanti,S.E.,A.K.,M.M.,CA yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak M. Orba Kurniawan S.E.,S.H.,.,M.Si selaku Pembimbing Akademik paket 11 Angkatan 2013

5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Sahabat-sahabat paket 11

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Februari 2019

Penulis

M Benny Satria

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL. i

HALAMAN PENGESAHAN. ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT. iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN. iv

HALAMAN PRAKATA. v

HALAMAN DAFTAR ISI. vii

HALAMAN DAFTAR TABEL. iix

HALAMAN DAFTAR GAMBAR. x

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN. xi

ABSTRAK. xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH..... 1

B. RUMUSAN MASALAH 11

C. TUJUAN PENELITIAN 11

D. MANFAAT PENELITIAN..... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori..... 13

1. Standar Akuntansi Pemerintah 13

2. Basis Akrual 18

3. Akuntabilitas. 30

4. Kualitas Laporan Keuangan. 32

5.PenelitianSebelumnya 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 38

B. Lokasi Penelitian 39

C. Operasionalisasi Variabel..... 39

D. Data yang Diperlukan 40

E. Tekhnik Pengumpulan Data 40

F. Analisis Data dan Tekhnik Analisis 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 43

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan. 43

2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan..... 45

3.Struktur Organisasi Provinsi Sumatera Selatan 48

4. Pembahasan Hasil Penelitian 49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	7
Tabel 1.2	Perbandingan Komponen Basis Kas Dengan Basis Akrual	8
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	37
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	39
Tabel IV.1	Neraca	52
Tabel IV.2	Laoran Realisasi Anggaran.....	56
Tabel IV.3	Laporan Arus Kas	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Fotokopi Surat Keterangan Riset dan Tempat Penelitian	70
Lampiran 2	Fotokopi Sertifikat membaca dan Menghafal Alqur'an	71
Lampiran 3	Fotokopi Lembar Persetujuan Skripsi.	72
Lampiran 4	Fotokopi Aktifitas Bimbingan Skripsi.....	73
Lampiran 5	Biodata Penulis	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik .

Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan dengan basis akrual yang ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Penerapan PP No. 24 tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang no. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, Dan adanya perubahan standar akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju basis akrual ini akan membawa dampak terhadap pengelolaan keuangan negara.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya Dalam 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus direalisasikan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa

pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. dan standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Mahsun (2006: 65) mendefinisikan standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut dengan SAP (standar akuntansi pemerintah). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelolah penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan yang dimaksud tersebut adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP tahun 2005) yang sekarang telah dirubah dan diganti menjadi peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP 2010).

Mahmudi (2010: 3) Mendefinisikan Pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan publik yang membutuhkan informasi. Dengan itu tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi.

Akrual basis merupakan penyandingan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atau kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. Lebi jauh lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai tekhnik pengendalian.

Kas basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan pristiwa lainnya pada saat kas diterima

atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu instansi. Sehingga indikasi dari penyajian laporan keuangan yang relevan adalah kualitas laporan keuangan yang disajikan dengan pengelolaan yang relevan. Pengelolaan keuangan merupakan hal penting didalam kinerja pemerintah, dimana dengan pengelolaan keuangan yang baik maka anggaran pemerintah menjadi jelas baik itu pendapatan maupun belanja. Dengan demikian pengelolaan keuangan ini harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel. Dan setelah adanya perubahan standar akuntansi keuangan pemerintah dari basis kas menuju basis akrual ini pengelolaan keuangan pun menjadi hal prioritas didalam kinerja pemerintah, agar bisa meminimalisir kecurangan dalam transaksi pengelolaan laporan keuangan.

Instansi pemerintah merupakan lembaga pemerintah dengan ikatan organisasi yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada lembaga tersebut. Instansi pemerintah dengan pelayanan publik dapat menjadi indikasi baik atau buruknya pelayanan yang diberikan sehingga instansi pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan yang bagus. Dalam hal ini instansi pemerintah yang dipilih sebagai objek penelitian adalah pemerintah provinsi sumatera selatan. Semua instansi pemerintah

diharuskan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual didalam menyusun laporan keuangannya termasuk pemerintah provinsi sumatera selatan. Karena laporan keuangan yang di hasilkan dari semua instansi pemerintah bisa menjadi referensi untuk mengetahui kualitas laporan keuangan. Sehingga menjadi tolak ukur pemerintah kota maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Tabel I.1
Opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Basis Kas	Basis Akrual
2012 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2013 : Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2014 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-DPP)	2015 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Hasil Wawancara, 2018

Tabel 1.2
Perbandingan Komponen basis Kas dengan basis Akrual

No.	Keterangan	SAP Berbasis Kas Menuju Akrual	SAP Berbasis Akrual
1.	Komponen laporan keuangan	Laporan keuangan pokok: 1. Neraca 2. Laporan realisasi anggaran 3. Laporan arus kas 4. Catatan atas laporan yang bersifat opsional: 1. Laporan kinerja keuangan (LKK) 2. Laporan perubahan ekuitas (LPE)	Laporan Anggaran: 1. Laporan realisasi anggaran (LRA) 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) Laporan Finansial: 1. Neraca 2. Laporan operasional (LO) 3. Laporan arus kas (LAK) 4. Laporan perubahan ekuitas (LPE) 5. Catatan atas laporan keuangan (CALK)
2.	Laporan realisasi anggaran	Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundangan	Tetap diperlukandalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam perundangan
3.	Laporan perubahan SAL	Tidak ada laporan sendiri	Laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 1. Saldo anggaran lebih awal 2. Saldo anggaran lebih 3. Sisa lebih/kurang

			pembiayaan 4. Anggaran tahun berjalan 5. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain 6. Saldo anggaran lebih akhir
5.	Neraca	Akun ekuitas disebut sebagai ekuitas dana yang terbagi: 1. Ekuitas dana lancar 2. Ekuitas dana investasi 3. Ekuitas dana cadangan	Tidak lagi disebut ekuitas dana, hanya ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo ekuitas pada laporan ekuitas.
6.	Laporan arus kas	1.Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.	1.Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan 2.Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,pembiayaan dan non anggaran.
7.	Laporan kinerja keuangan/laporan operasional	1.Bersifat opsional 2.Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual	Merupakan keuangan pokok
8.	Laporan perubahan ekuitas	Bersifat opsional	Merupakan laporan keuangan pokok
9.	Catatan atas laporan keuangan	1.Disajikan secara sistematis setiap pos dalam	1.Disajikan secara sistematis setiap pos

		LRA,Neraca,dan LAK harus mempunyai referensi silangdengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan 2.CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis ataus nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,Neraca,dan LAK	dalam LRA,Neraca,dan LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan 2.CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis ataus nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,Neraca,dan LAK

Sumber:PemprovSumsel (Hasil wawancara,2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut bahwasannya selama penerapan basis akrual pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu meraih predikat wajar tanpa pengecualian berarti basis akrual memberikan dampak yang yang positif terhadap standar pengelolaan keuangan, akan tetapi bukan berarti dengan tiga kali berturut-turut meraih predikat pengelolaan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian tidak ada masalah yang ditemui lagi, namun didalam laporan keuangan basis akrual tahun 2015,2016 dan 2017 masih terdapat beberapa kendala seperti Masih perlu adanya penyesuaian dalam hal penganggaran, pegawai harus memahami dalam penyusunan laporan keuangan, artinya pegawai mesti benar-benar paham tentang standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual, maka dari itu pihak pemerintah juga harus memberikan sosialisasi tentang basis

akrual kepada staf pegawai keuangan seluruh instansi dan juga selalu melakukan training bagi para pegawail. Untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Instansi Terkait

   Diharapkan penelitian ini sebagai bahan tambahan ataupun masukkan mengenai bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan acuan didalam menambah ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sanusi. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan keenam. Jakata: Penerbit Salemba Empat.

Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*: *Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.

Langelo, Friska. (2015). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. JURNAL EMBA* Vol. 3 No. 1 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556 Diakses pada tanggal 22 oktober 2015 Hal 1-8.

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Purwanugraha. (2006). *akuntansi Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.

Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Andi Offset. Yogyakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2010*. Tamita Utama. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi *Pemerintahan Berbasis Kas.*

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar akuntansi *Pemerintahan Berbasis akrual.*

Sampel, Indra Franselski. (2015). *Analisis Kesiapan pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual*. *JURNAL EMBA* Vol. 3 no. 1 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7325 Diakses pada tanggal 22 oktober 2015 hal. 621-630.

Wisnu, H. (2007). *Persepsi Stakeholders terhadap Kriteria Akuntabilitas Keuanganpada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis Program PascaSarjana UGM (Tidak dipublikasikan) Yogyakarta. Dwi Priyantoro. (2009). *Mandiri Belajar SPSS*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Kirta. Jakarta.